

## PERAN PENGELOLA BADAN USAHA MILIK DESA MENURUNKAN KEMISKINAN DI PEDESAAN DI PROVINSI BALI

Ni Kadek Sinarwati<sup>1\*</sup>, I Komang Eka Putra<sup>2</sup>

<sup>1\*</sup>Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Bali, Indonesia

E-mail: [nikadeksinarwati@undiksha.ac.id](mailto:nikadeksinarwati@undiksha.ac.id)

<sup>2</sup>Program Studi Administrasi Bisnis, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik Wira Bhakti, Denpasar, Bali, Indonesia

E-mail: [komangeka9@stispolwb.ac.id](mailto:komangeka9@stispolwb.ac.id)

### ABSTRAK

Badan Usaha Milik Desa/BUMDes merupakan lembaga wirausaha sosial yang diharapkan menjadi penggerak ekonomi dan menurunkan kemiskinan di pedesaan. Riset sebelumnya banyak mengulas tentang peran BUMDes meningkatkan Pendapatan Asli Desa, namun riset tentang peran pengelola BUMDes menurunkan kemiskinan di pedesaan masih terbatas. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan: peran pengelola BUMDes menurunkan kemiskinan di pedesaan, factor pendukung dan penghambat peran pengelola BUMDes. Responden penelitian adalah pengelola/direktur BUMDes di Provinsi Bali sejumlah 160 orang yang ditentukan dengan metode aksidental sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelola BUMDes berperan menurunkan kemiskinan di pedesaan namun perannya masih sangat rendah dengan nilai rata-rata peran sebesar 33,36 persen. Peran terbesar pengelola BUMDes menurunkan kemiskinan di pedesaan terdapat pada indikator meningkatkan persentase warga desa peserta sistem jaminan sosial nasional bidang ketenagakerjaan. Peran ini dilakukan dengan pengelola BUMDes menjadi “agen perisai”. Empat faktor pendukung peran adalah ketersediaan sumber daya alam, program pemberdayaan masyarakat, dukungan pemerintah dan kerjasama dengan pihak ketiga. Empat factor penghambatnya adalah rendahnya kompetensi SDM di BUMDes, kesulitan mencari pegawai, rendahnya kesadaran masyarakat mengembalikan pinjaman dan keberadaan BUMDes belum banyak diketahui masyarakat desa. Saran disampaikan kepada baik pengelola BUMDes dan instansi terkait untuk meningkatkan kompetensi pengelola dan pegawai BUMDes agar mampu meningkatkan peran menurunkan kemiskinan di pedesaan.

**Kata Kunci:** Kemiskinan; Pedesaan; BUMDes

### ABSTRACT

Village-Owned Enterprises/BUMDes are social enterprise institutions that are expected to be economic drivers and reduce rural poverty. Previous research has commented on the role of BUMDes in increasing Village Original Income, but research on the role of BUMDes managers in reducing rural poverty is still limited. This study aims to describe: the role of BUMDes managers in reducing rural poverty, supporting and inhibiting factors for the role of BUMDes managers. The respondents of the

Diserahkan : 2024-10-11,  
Direvisi : 2024-12-15,  
Diterima : 2025-01-19,

Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial dilisensikan di bawah Lisensi | 17  
Creative Commons Atribusi-NonKomersial  
4.0 Internasional. (CC BY-NC 4.0)



study were managers/directors of BUMDes in Bali Province as many as 160 people determined by the accidental sampling method. The results showed that BUMDes managers play a role in reducing rural poverty but their role is still very low with an average role value of 33.36 percent. The biggest role of BUMDes managers in reducing rural poverty lies in the indicator of increasing the percentage of villagers participating in the national social security system in the field of employment. This role is performed with the BUMDes manager being the "perisai agent". Four factors supporting the role are the availability of natural resources, community empowerment programs, government support and cooperation with third parties. The four inhibiting factors are the low competence of human resources in BUMDes, difficulty finding employees, low public awareness of repaying loans and the existence of BUMDes is not widely known to rural communities. Suggestions were conveyed to both BUMDes managers and related agencies to improve the competence of BUMDes managers and employees in order to increase the role of reducing rural poverty.

**Keywords:** *Poverty; Rural; BUMDes*

## **PENDAHULUAN**

Kemiskinan merupakan masalah pembangunan yang dihadapi negara-negara di dunia. Kemiskinan telah menjadi fenomena obyektif di seluruh umat manusia sejarah dan proses perkembangan sosial manusia (Liu, 2016). Kemiskinan adalah “kekurangan kesejahteraan yang nyata.” Pandangan konvensional mengaitkan kesejahteraan terutama dengan penguasaan atas komoditas, sehingga masyarakat miskin adalah mereka yang tidak memiliki pendapatan atau konsumsi yang cukup. Pandangan ini melihat kemiskinan sebagian besar dilihat dari segi moneter (*Poverty and Its Measurement*, n.d.). Kemiskinan menurut wilayah, terjadi baik dipertanian maupun dipedesaan. Di Indonesia, angka kemiskinan di pedesaan lebih tinggi dari pada di perkotaan (BPS, 2022). Angka kemiskinan yang tinggi di pedesaan tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di beberapa negara lain di dunia. Upaya pengentasan kemiskinan pedesaan diantaranya memberikan bantuan pendanaan kepada pelaku usaha mikro di pedesaan, pembangunan infrastruktur di pedesaan, melakukan rekayasa pedesaan termasuk rekonsolidasi lahan pedesaan, restrukturisasi kewilayahan dan kelembagaan di pedesaan ditemukan efektif menurunkan kemiskinan pedesaan (Lo, 2016); (Banerjee, 2017); (Aggarwal, 2018); (Liu, 2019).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu kelembagaan dan badan hukum yang telah mengalami penguatan kelembagaan pasca Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021. BUMDes memiliki kewenangan untuk mengelola potensi desa. Jumlah BUMDes di Indonesia sejak 2014 mengalami peningkatan yang signifikan tetapi belum semuanya produktif dalam menjalankan usaha (Winarti & Herawati, 2020), meskipun demikian BUMDes ditemukan berperan bagi pembangunan pedesaan. Kehadiran BUMDes telah mampu membuka lowongan kerja, mengurangi pengangguran di pedesaan, membebaskan warga desa dari rentenir, sehingga kehadiran BUMDes membawa perubahan ekonomi dan sosial di pedesaan (Ni Kadek Sinarwati, 2019); (Anggraeni, 2016). Modal BUMDes bersumber dari pemerintah desa melalui alokasi dana desa, bantuan dari pemerintah daerah/provinsi, tabungan masyarakat desa dan kerjasama dengan pihak lain (Zulkarnain, 2013). Permodalan BUMDes

di Provinsi Bali, selain bersumber dari pemerintah pusat melalui alokasi dana desa, juga bersumber dari bantuan Pemerintah Provinsi Bali melalui program Gerakan Pembangunan Desa Terpadu.

BUMDes sebagai lembaga wirausaha sosial melakukan kegiatan usaha di desa dengan memberdayakan masyarakat baik secara ekonomi dan sosial, sehingga memberikan benefit bagi masyarakat desa dan hasil dari kegiatan usaha membantu perekonomian masyarakat desa untuk menurunkan angka kemiskinan di desa (Winarti & Herawati, 2020). Lembaga wirausaha sosial merupakan sebuah lembaga yang memenuhi kriteria: memiliki tujuan sosial, melakukan aksi pemberdayaan, memiliki prinsip etika bisnis dan memberikan manfaat sosial (Haryanti et al., 2016). BUMDes memenuhi kriteria tersebut sehingga dapat dinyatakan BUMDes merupakan Lembaga wirausaha sosial di desa yang diharapkan berperan dalam mengurangi kemiskinan di desa. BUMDes didirikan dengan tujuan untuk a) melakukan kegiatan ekonomi dengan cara mengelola usaha, mengembangkan investasi dan produktivitas perekonomian di desa. b) mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya ekonomi masyarakat desa (Badan, 1945). Tujuan tersebut menyuratkan bahwa BUMDes memiliki peran dalam menurunkan tingkat kemiskinan di desa. Apakah pengelola BUMDes sudah berperan dalam menurunkan kemiskinan di pedesaan, merupakan sebuah pertanyaan yang harus dijawab dengan sebuah riset. Faktanya riset tentang peran pengelola BUMDes dalam menurunkan kemiskinan di pedesaan masih terbatas, sehingga memotivasi penelitian ini. Bagaimanakah persepsi pengelola BUMDes terhadap perannya dalam menurunkan kemiskinan di pedesaan?, apa upaya yang dilakukan pengelola BUMDes dalam menurunkan kemiskinan di pedesaan, apa faktor pendukung upaya pengelola BUMDes menurunkan kemiskinan di pedesaan? apa faktor penghambat upaya pengelola BUMDes menurunkan kemiskinan di pedesaan?. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran pengelola BUMDes dalam menurunkan kemiskinan pedesaan, serta menganalisis factor pendukung dan penghambat penurunan kemiskinan pedesaan.

## **METODE PENELITIAN**

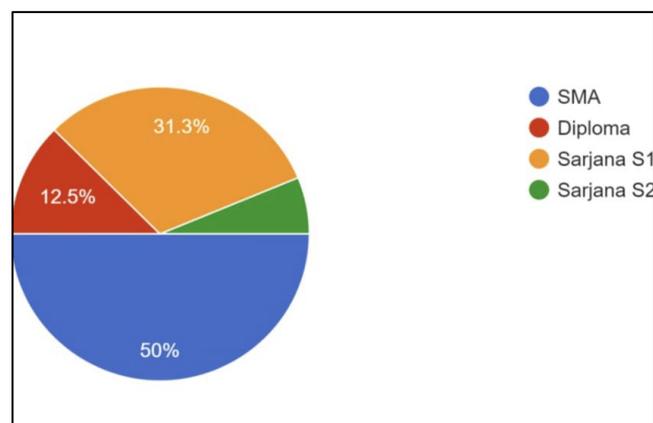
Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menggunakan data berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar yang kemudian di deskripsikan tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan satu variable dengan variable yang lain (Sugiyono, 2019). Penelitian ini mendeskripsikan dan mengkonfirmasi persepsi dan upaya yang dilakukan pengelola BUMDes dalam menurunkan kemiskinan di pedesaan. Jenis data yang digunakan adalah kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif adalah persepsi dan upaya pengelola BUMDes. Data kuantitatif adalah data jumlah BUMDes di Provinsi Bali yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Bali. Data dikumpulkan dengan teknik dokumentasi, kuesioner dan wawancara. Responden penelitian adalah pengelola BUMDes dalam hal ini direktur BUMDes di Provinsi Bali yang ditentukan dengan teknik aksidental sampling. Data dianalisis dengan teknik analisis deskriptif kualitatif dengan

memaparkan persepsi dan upaya pengelola BUMDes. Validitas data dijamin dengan menggunakan triangulasi metode pengumpulan data.

Peran adalah serangkaian kegiatan yang di dalamnya terdapat norma yang diungkapkan dengan posisi seseorang di masyarakat; suatu konsep mengenai apa yang dilakukan seseorang dalam organisasi atau masyarakat (Muhtar, 2020). Peran pengelola BUMDes dalam menurunkan kemiskinan di pedesaan dalam penelitian ini mengacu definisi peran yang disampaikan sebelumnya, adalah persepsi dan seperangkat kegiatan yang dilakukan oleh pengelola (direktur) BUMDes dalam menurunkan kemiskinan di pedesaan. Indikator penurunan kemiskinan di pedesaan mengacu indikator pencapaian Sustainable Development Goals/SDGs Desa yang pertama yaitu Desa Tanpa Kemiskinan dengan sub indikator yaitu tingkat kemiskinan di desa mencapai nol persen, persentase warga desa peserta sistem jaminan sosial nasional bidang Kesehatan, persentase warga desa peserta sistem jaminan sosial nasional bidang ketenagakerjaan, jumlah keluarga miskin penerima bantuan sosial, jumlah keluarga miskin mendapat layanan kesehatan, jumlah keluarga miskin mendapat layanan pendidikan, jumlah keluarga miskin mendapat layanan air bersih, jumlah keluarga miskin mendapat layanan hunian layak, jumlah keluarga miskin korban bencana yang ditangani (*Indikator SDG's Dan Kewenannya*, n.d.).

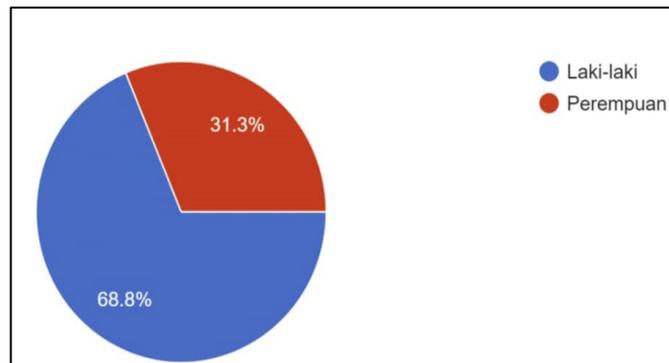
## PEMBAHASAN

Informan penelitian adalah direktur BUMDes di Provinsi Bali, terdapat 160 orang direktur yang memberikan tanggapan terhadap kuesioner yang disebarakan melalui group WhatsApp Forum BUMDes Indonesia wilayah Bali. Karakteristik pengelola BUMDes dalam penelitian ini menggunakan tingkat pendidikan, jenis kelamin, lama waktu menjadi pengelola BUMDes, usia dan keikutsertaan mengikuti pelatihan dan pendampingan. Karakteristik responden disajikan pada Gambar 1 sampai dengan Gambar 5.



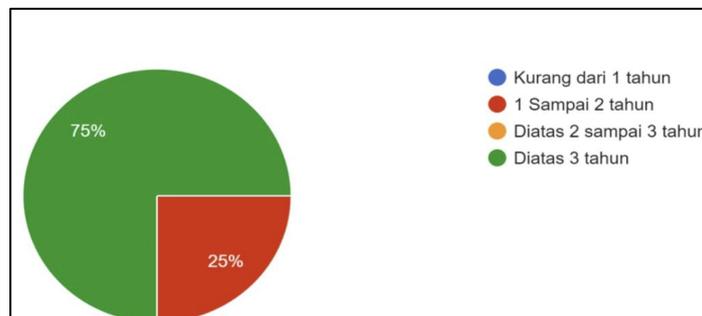
**Gambar 1.** Karakteristik Responden Ditinjau Dari Tingkat Pendidikan

Karakteristik responden dari tingkat pendidikan menunjukkan bahwa mayoritas (50 persen) pengelola BUMDes berpendidikan SMA dan minoritas (6,2 persen) berpendidikan Sarjana Strata 2 (S2). Pengelola BUMDes berpendidikan S2 adalah Direktur BUMDes Pakseballi di Desa Pakseballi Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung atas nama Bapak I Made Mustika, SE.,MH.



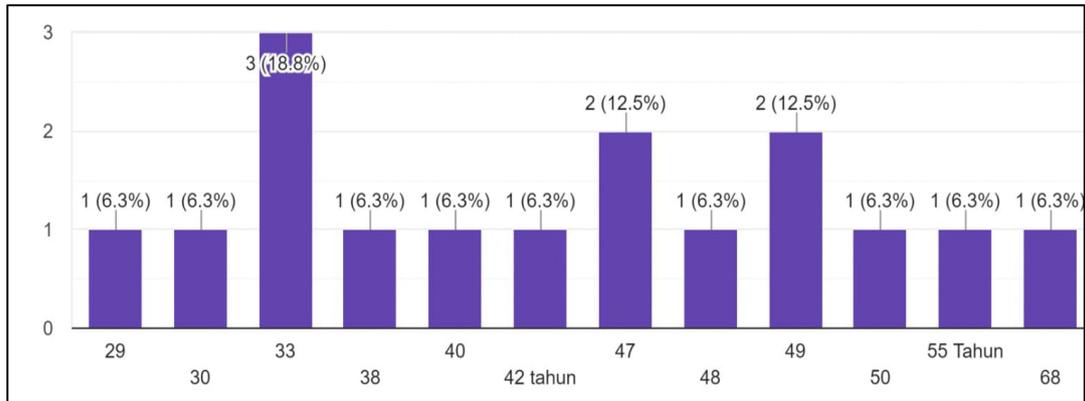
**Gambar 2.** Karakteristik Responden Ditinjau Dari Segi Jenis Kelamin

Karakteristik responden dari jenis kelamin menunjukkan bahwa mayoritas (69,8 persen) pengelola BUMDes berjenis kelamin laki-laki dan 31,3 persen pengelola berjenis kelamin perempuan.



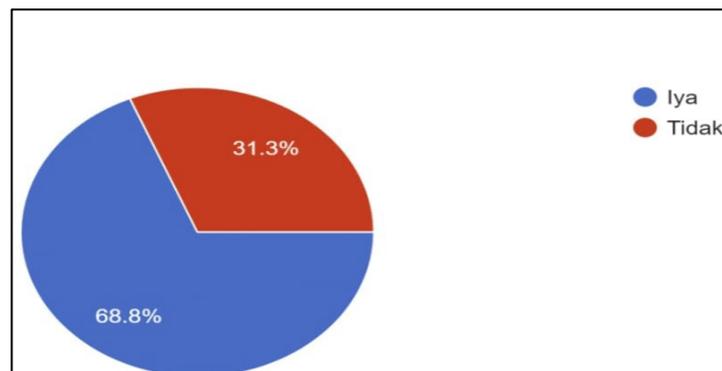
**Gambar 3.** Karakteristik Responden Dari Segi Lama Waktu Menjadi Pengelola BUMDes

Karakteristik responden ditinjau dari segi lama waktu menjadi pengelola BUMDes menunjukkan mayoritas (75 persen) responden sudah menjadi pengelola BUMDes diatas 3 tahun dan hanya 25 persen menjadi pengelola dari 1 sampai 2 tahun.



**Gambar 4.** Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

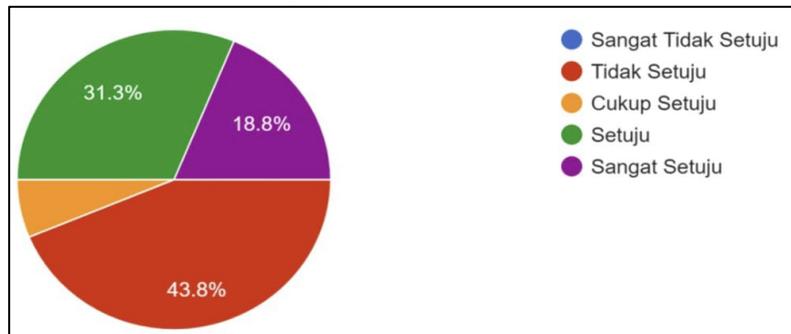
Karakteristik responden ditinjau dari segi usia, menunjukkan mayoritas (18,8) persen pengelola BUMDes berusia 33 tahun. Usia terendah adalah 29 tahun dan usia tertinggi adalah 68 tahun.



**Gambar 5.** Karakteristik Responden Berdasarkan Keikutsertaan Dalam Pelatihan

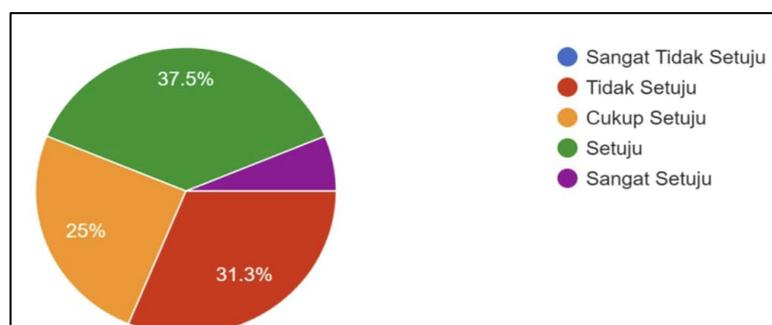
Karakteristik responden berdasarkan keikutsertaan dalam pelatihan menunjukkan bahwa mayoritas (68,8) persen pengelola BUMDes pernah mengikuti pelatihan dan sisanya 31,2 persen menyatakan tidak pernah mengikuti pelatihan. Umumnya pelatihan yang diterima oleh pengelola BUMDes adalah pelatihan penyusunan laporan keuangan, pelatihan pendaftaran badan hukum, pelatihan penyusunan bentang alam, pelatihan pengenalan potensi desa dan pelatihan menjadi agen perisai. Pemberi pelatihan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali, Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Provinsi dan Kabupaten, dan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) wilayah Provinsi Bali. Pelaksana operasional BUMDes menyatakan sampai saat ini belum pernah mendapatkan pelatihan peningkatan orientasi kewirausahaan.

### Persepsi Pengelola BUMDes dan Upaya Mereka Menurunkan Kemiskinan



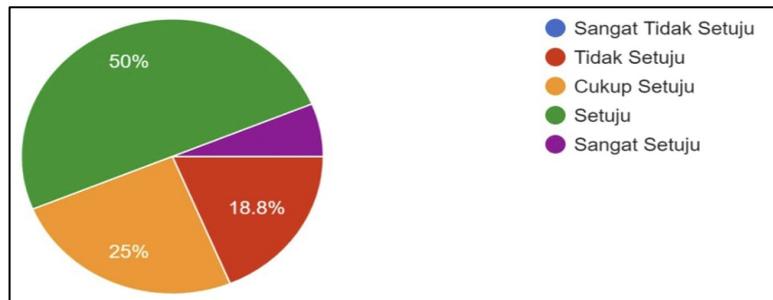
**Gambar 6.** Persepsi Pengelola BUMDes Atas Perannya Dalam Mewujudkan Tingkat Kemiskinan Di Desa Mencapai Nol Persen.

Persepsi pengelola BUMDes atas perannya dalam menurunkan tingkat kemiskinan di desa mencapai nol persen, menunjukkan mayoritas (43,8 persen) menyatakan tidak setuju, 31,3 persen menyatakan setuju 18, 8 persen menyatakan sangat setuju dan 5,1 persen menyatakan cukup setuju. Data ini menunjukkan bahwa pengelola BUMDes menyatakan mereka belum berperan dalam mewujudkan tingkat kemiskinan desa mencapai nol persen.



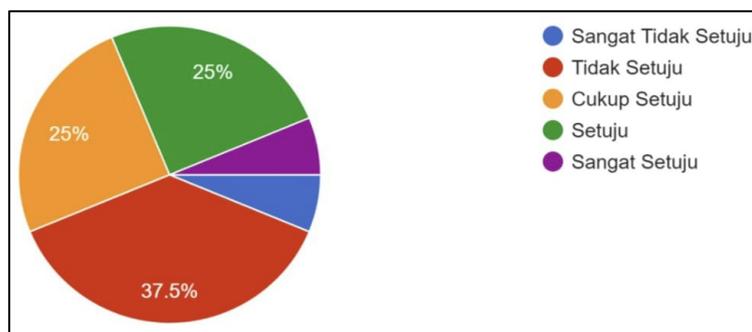
**Gambar 7.** Persepsi Pengelola BUMDes Atas Perannya Dalam Meningkatkan Persentase Warga Desa Peserta Sistem Jaminan Sosial Nasional Bidang Kesehatan.

Persepsi pengelola BUMDes atas perannya dalam meningkatkan persentase warga desa peserta sistem jaminan sosial nasional bidang kesehatan, menunjukkan mayoritas (37,5 persen) pengelola BUMDes menyatakan mereka setuju berperan dalam meningkatkan persentase warga desa peserta sistem jaminan sosial nasional bidang kesehatan.



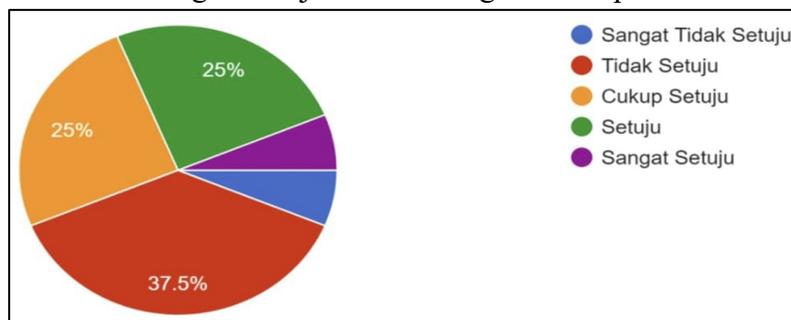
**Gambar 8.** Persepsi Pengelola BUMDes Atas Perannya Dalam Meningkatkan Persentase Warga Desa Peserta Sistem Jaminan Sosial Nasional Bidang Ketenagakerjaan.

Persepsi pengelola BUMDes atas perannya dalam meningkatkan persentase warga desa peserta sistem jaminan sosial nasional bidang ketenagakerjaan, menunjukkan bahwa mayoritas (50 persen) menyatakan bahwa mereka berperan dalam meningkatkan persentase warga desa sebagai peserta sistem jaminan sosial bidang ketenagakerjaan.



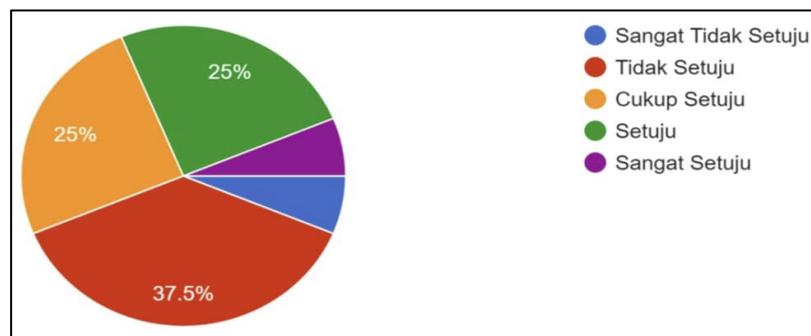
**Gambar 9.** Persepsi Pengelola BUMDes Atas Perannya Dalam Meningkatkan Jumlah Keluarga Miskin Penerima Bantuan Sosial.

Persepsi pengelola BUMDes atas perannya dalam meningkatkan jumlah keluarga miskin penerima bantuan sosial, menunjukkan mayoritas (37,5 persen) mereka setuju bahwa mereka berperan dalam meningkatkan jumlah keluarga miskin penerima bantuan sosial.



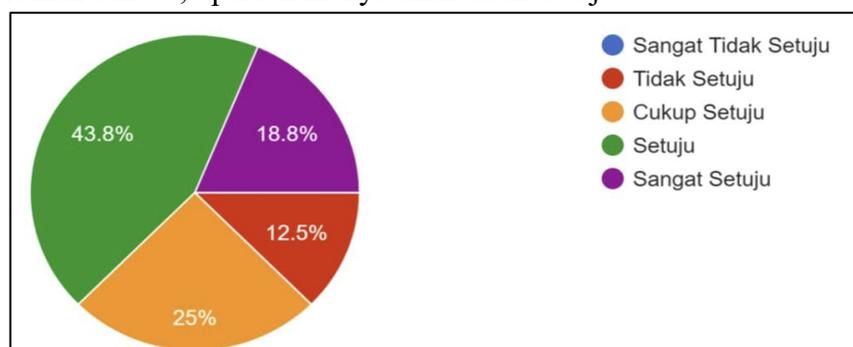
**Gambar 10.** Persepsi Pengelola BUMDes Atas Perannya Dalam Meningkatkan Jumlah Keluarga Miskin Mendapat Layanan Kesehatan.

Persepsi pengelola BUMDes atas perannya dalam meningkatkan jumlah keluarga miskin mendapat layanan kesehatan, menunjukkan mayoritas (37,5 persen) mereka tidak setuju bahwa mereka berperan dalam meningkatkan jumlah keluarga miskin mendapat layanan kesehatan.



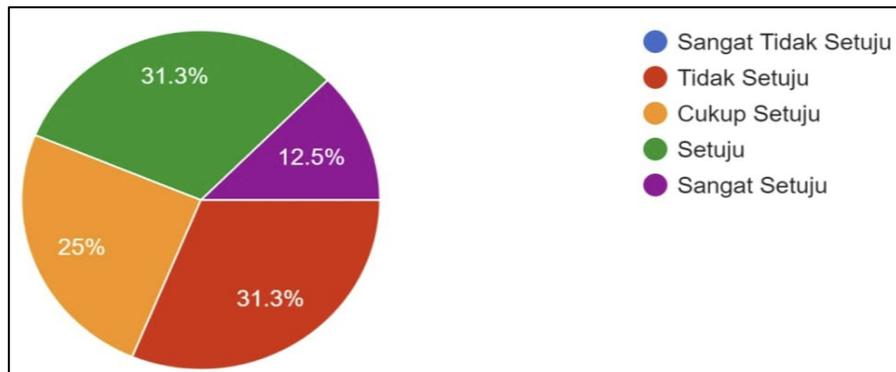
**Gambar 11.** Persepsi Pengelola BUMDes Atas Perannya Dalam Meningkatkan Jumlah Keluarga Miskin Mendapat Layanan Pendidikan.

Persepsi pengelola BUMDes atas perannya dalam meningkatkan jumlah keluarga miskin mendapat layanan Pendidikan, menunjukkan bahwa 25 persen pengelola BUMDes menyatakan mereka setuju berperan dalam meningkatkan jumlah keluarga miskin mendapat layanan pendidikan dan 37,5 persen menyatakan tidak setuju.



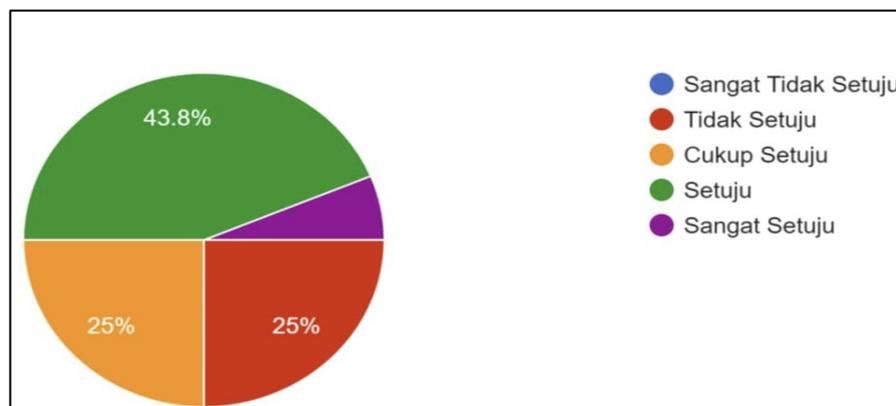
**Gambar 12.** Persepsi Pengelola BUMDes atas perannya dalam meningkatkan jumlah keluarga miskin mendapat layanan air bersih

Persepsi Pengelola BUMDes atas perannya dalam meningkatkan jumlah keluarga miskin mendapat layanan air bersih, menunjukkan mayoritas (43,8 persen) pengelola BUMDes menyatakan setuju bahwa mereka berperan dalam meningkatkan jumlah keluarga miskin yang mendapat layanan air bersih. Hanya 12,5 persen yang menyatakan bahwa mereka tidak berperan dalam meningkatkan jumlah keluarga miskin mendapat layanan air bersih.



**Gambar 13.** Persepi Pengelola BUMDes atas perannya dalam meningkatkan jumlah keluarga miskin mendapat layanan hunian layak

Persepi Pengelola BUMDes atas perannya dalam meningkatkan jumlah keluarga miskin mendapat layanan hunian layak, menunjukkan bahwa persentasenya seimbang (sama-sama sebesar 31,3 persen) antara yang menyatakan setuju dengan yang menyatakan tidak setuju terhadap peran mereka dalam meningkatkan jumlah keluarga miskin mendapat hunian layak.



**Gambar 14.** Persepi Pengelola BUMDes Atas Perannya Dalam Meningkatkan Jumlah Keluarga Miskin Korban Bencana yang Ditangani.

Rekapitulasi persepsi pengelola BUMDes terhadap perannya dalam menurunkan kemiskinan di pedesaan, disajikan pada Tabel 1.

**Tabel 1.** Rekap Persepsi Pengelola BUMDes

No	Indikator Penurunan Kemiskinan	Persentase Menjawab Setuju (%)	Persentase Menjawab Tidak Setuju (%)
1	Pengelola BUMDes berperan mewujudkan tingkat kemiskinan di desa mencapai nol persen	18,8	<b>43,8</b>
2	Pengelola BUMDes berperan meningkatkan persentase warga desa peserta sistem jaminan sosial nasional bidang kesehatan	37,5	31,3
3	Pengelola BUMDes berperan meningkatkan persentase warga desa peserta sistem jaminan sosial nasional bidang ketenagakerjaan	<b>50</b>	18,8
4	Pengelola BUMDes berperan meningkatkan jumlah keluarga miskin penerima bantuan sosial	25	37,5
5	Pengelola BUMDes atas perannya dalam meningkatkan jumlah keluarga miskin mendapat layanan kesehatan	25	37,5
6	Pengelola BUMDes atas perannya dalam meningkatkan jumlah keluarga miskin mendapat layanan pendidikan	25	37,5
7	Pengelola BUMDes atas perannya dalam meningkatkan jumlah keluarga miskin mendapat layanan air bersih	<b>43,8</b>	12,5
8	Pengelola BUMDes atas perannya dalam meningkatkan jumlah keluarga miskin mendapat layanan hunian layak	31,3	31,3
9	Pengelola BUMDes atas perannya dalam meningkatkan jumlah keluarga miskin korban bencana yang ditangani	<b>43,8</b>	25
Rata-rata		<b>33,36</b>	<b>30,58</b>

Sumber: Diolah dari jawaban responden

Data Tabel 1. menunjukkan bahwa persepsi peran pengelola BUMDEs menurunkan kemiskinan dari sembilan (9) indikator penurunan kemiskinan pedesaan, persentase pernyataan setuju yang tertinggi ada pada indikator pengelola BUMDes berperan meningkatkan persentase warga desa peserta sistem jaminan sosial nasional bidang ketenagakerjaan dengan persentase jawaban setuju sebesar 50 persen. Persentase jawaban setuju tertinggi kedua (43,8) ada pada inidikator pengelola BUMDes atas perannya dalam meningkatkan jumlah keluarga miskin mendapat layanan air bersih dan pengelola BUMDes atas perannya dalam meningkatkan jumlah keluarga miskin korban bencana yang ditangani. Persentase jawaban setuju terendah (18,8) adalah di indikator Pengelola BUMDes berperan mewujudkan tingkat kemiskinan di desa mencapai nol persen. Data ini menunjukkan bahwa peran terbanyak yang pengelola

BUMDes lakukan dalam menurunkan kemiskinan pedesaan adalah dengan meningkatkan persentase warga desa peserta sistem jaminan sosial nasional bidang ketenagakerjaan.

Persentase jawaban tidak setuju tertinggi peran pengelola BUMDes dalam menurunkan kemiskinan (43,8) persen, terdapat di indikator Pengelola BUMDes berperan mewujudkan tingkat kemiskinan di desa mencapai nol persen. Persentase jawaban tidak setuju terendah dalam menurunkan kemiskinan (12,5) persen, terdapat di indikator pengelola BUMDes berperan meningkatkan jumlah keluarga miskin mendapat layanan air bersih. Data ini menunjukkan bahwa pengelola BUMDes belum berperan dalam mewujudkan tingkat kemiskinan mencapai nol persen, namun demikian pengelola BUMDes berperan dalam meningkatkan jumlah keluarga miskin mendapat layanan air bersih. Apa dan bagaimana Upaya BUMDes dalam menyediakan layanan air bersih disajikan pada sub bab berikutnya.

Nilai rata-rata jawaban setuju terhadap pernyataan atas peran pengelola BUMDes menurunkan kemiskinan melalui sembilan indikator adalah 33,36 lebih tinggi dari persentase jawaban tidak setuju (30,58) menunjukkan bahwa pengelola BUMDes telah berperan dalam menurunkan kemiskinan pedesaan, namun tingkat perannya masih sangat rendah. Temuan ini sejalan dengan (Anggraeni, 2016);(Pada et al., 2016); (Sayuti, 2011), namun demikian hasil ini tidak berhasil mendukung temuan (Wicaksono et al., 2019) yang menyatakan kehadiran BUMDes tidak berdampak pada penyerapan tenaga kerja di pedesaan, sehingga BUMDes belum mampu mengurangi pengangguran dan kemiskinan di pedesaan.

### **Upaya Pengelola BUMDes Menurunkan Kemiskinan di Pedesaan**

Upaya-upaya yang dilakukan pengelola BUMDes di Bali dalam menurunkan kemiskinan di pedesaan diantaranya, BUMDes Artha Krama Mandiri Antiga Kelod, di Desa Antiga Kelod Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem, memberikan pinjaman dengan bunga ringan kepada pelaku usaha mikro di pedesaan. BUMDes Artha Krama Mandiri Antiga Kelod, di Desa Antiga Kelod Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem, memberikan pinjaman dengan bunga ringan kepada pelaku usaha mikro di pedesaan. Kehadiran pinjaman dana dengan bunga ringan dari BUMDes telah membebaskan pelaku usaha mikro misalnya pedagang canang, pemilik warung kelontong dari jeratan rentenir. Kehadiran BUMDes telah menyerap tenaga kerja dan mengurangi perpindahan penduduk dari desa ke kota (Ni Kadek Sinarwati, 2019). Hasil ini tidak sejalan dengan temuan riset yang menyatakan bahwa BUMDes di Indonesia belum mampu memberikan peluang kerja bagi masyarakat desa (Wicaksono et al., 2019).

Data Tabel 1.1 yang menunjukkan bahwa persentase persepsi tertinggi atas upaya pengelola BUMDes dalam menurunkan kemiskinan pedesaan ada pada indikator pengelola BUMDes berperan meningkatkan persentase warga desa peserta sistem jaminan sosial nasional bidang ketenagakerjaan. Data bermakna peran terbesar yang pengelola BUMDes lakukan dalam menurunkan kemiskinan pedesaan adalah meningkatkan persentase warga desa menjadi peserta sistem jaminan sosial bidang ketenagakerjaan. Hasil observasi menemukan bahwa

pengelola BUMDes di seluruh Kabupaten Karangasem yang tergabung dalam komunitas atau group whatsapp forum BUMDes Indonesia wilayah Kabupaten Karangasem saat ini sedang menjadi agen “perisai” BPJS ketenagakerjaan. Kata “Perisai” merupakan akronim dari penggerak jaminan sosial Indonesia. Pengelola BUMDes di Provinsi Bali bertindak sebagai agen perisai BPJS ketenagakerjaan dan mendaftarkan warga desa sebagai pesertanya, sehingga persentase warga desa menjadi peserta sistem jaminan sosial nasional (SJSN) bidang ketenagakerjaan meningkat.

Upaya pengelola BUMDes menurunkan kemiskinan pedesaan dengan indikator meningkatkan jumlah keluarga miskin mendapat layanan air bersih dilakukan oleh BUMDes di Desa Tajun Kabupaten Buleleng, Bumdes di Desa Menanga Kabupaten Karangasem yang mengelola potensi desa berupa sumber mata air dan menyalurkan ke rumah-rumah warga desa. Upaya pengelola BUMDes menurunkan kemiskinan pedesaan dengan indikator peningkatan persentase warga desa miskin yang mendapatkan pelayanan sistem jaminan sosial nasional (SJSN) bidang kesehatan dilakukan dengan membantu warga desa miskin mendapat kartu pelayanan kesehatan. Kartu pelayanan kesehatan gratis yang disediakan oleh pemerintah kepada warga desa miskin adalah KIS (Kartu Indonesia Sehat). Pengelola BUMDes membantu mengurus administrasi agar warga desa miskin memiliki Kartu Indonesia Sehat.

Upaya pengelola BUMDes meningkatkan jumlah keluarga miskin mendapat layanan hunian layak dilakukan dengan menyalurkan bantuan dana bedah rumah kepada warga desa miskin yang mendapat bantuan dana bedah rumah dari pemerintah desa yang merupakan salah satu alokasi dana desa. Membantu pemerintah desa menyalurkan dana bantuan pendidikan, menyalurkan dana bantuan sosial kepada warga desa yang miskin, mendaftarkan warga desa sebagai peserta sistem jaminan sosial Kesehatan, merupakan upaya yang dilakukan pengelola BUMDes dalam menurunkan kemiskinan di pedesaan. Peran pengelola BUMDes menurunkan kemiskinan pedesaan dengan indikator peningkatan jumlah keluarga miskin penerima bantuan sosial, peningkatan jumlah keluarga miskin mendapat layanan kesehatan dan peningkatan jumlah keluarga miskin mendapat layanan pendidikan dilakukan dengan membantu pemerintah desa menjadi penyalur dana layanan kesehatan, dana bantuan sosial dan penyalur dana bantuan pendidikan.

Penurunan kemiskinan pedesaan dapat tercapai jika BUMDes mampu menjadi penggerak ekonomi pedesaan. Aktivitas yang dilakukan BUMDes dalam rangka menjadi penggerak ekonomi pedesaan diantaranya adalah BUMDes di Desa Tembok Kabupaten Buleleng melakukan kerjasama dengan komunitas Petani Muda Keren menjualkan produk hasil pertanian milik masyarakat desa. BUMDes Kutuh di Desa Kutuh Kecamatan Kuta Kabupaten Badung bersama masyarakat desa melakukan inovasi membelah batu kapur sehingga terbuka akses menuju pantai Pandawa. Pengelola BUMDes yang berhasil meningkatkan jumlah modal yang semula Rp 1.839.441.337 menjadi Rp 2.269.478.390. BUMDes ini mengelola usaha jasa layanan pariwisata yang menyerap tenaga kerja lokal, meningkatkan perekonomian masyarakat desa dan menurunkan kemiskinan pedesaan. Upaya

yang dilakukan BUMDes Desa Kutuh menjalankan usaha pariwisata, telah mengentaskan merubah status desa dari desa miskin menjadi desa mandiri.

Upaya pengelola BUMDes mengelola dan menjadikan BUMDes sebagai lembaga wirausaha desa, telah menghasilkan BUMDes yang mampu menjadi penggerak potensi ekonomi desa. Pengelolaan potensi desa melalui BUMDes merupakan upaya pengentasan kemiskinan dan mampu menjaga keberlanjutan/resilensi warga miskin di pedesaan (Sayuti, 2011);(Steiner,2015 *Contribution of Rural Enterprise to Local Resilance*, n.d.). Keberhasilan BUMDes sebagai penggerak ekonomi pedesaan dalam menurunkan kemiskinan ditemukan pada peningkatan pendapatan asli desa (Yeganeh et al., 2021). Salah satu upaya penurunan kemiskinan pedesaan yang dilakukan pengelola BUMDes adalah dengan melakukan program pemberdayaan perempuan. Pengelola BUMDes di Desa Bebandem memberdayakan perempuan pengrajin anyaman dengan cara BUMDes menjadi pemasok bahan baku dan membantu penjualan produk pengrajin. Upaya pemberdayaan perempuan anggota kelompok pengrajin anyaman yang dilakukan oleh pengelola BUMDes di Desa Bebandem Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem serupa dengan yang dilakukan oleh pengelola BUMDes Tirta Mandiri di Desa Ponggok, Kabupaten Klaten yang memberdayakan kelompok perempuan melalui kemitraan untuk menjalankan bisnis usaha kecil mikro lokal khas desa di area umbul ponggok (Winarti & Herawati, 2020). Temuan ini sejalan dengan hasil riset (GU & NIE, 2021); (Eggerman et al., 2023) yang menyatakan pemberdayaan perempuan mampu mengurangi kemiskinan.

Pengelola BUMDes sebagai manajer dari usaha sosial, perlu memiliki orientasi wirausaha dan menumbuhkan jiwa sosial, sehingga BUMDes mampu memperoleh profit dan juga memberikan benefit. Pengelola BUMDes di Desa memberdayakan masyarakat desa dalam pengelolaan desa wisata berbasis sumber daya alam. Wisata tracking dan panjat tebing menjadi andalan desa yang dikelola oleh BUMDes Bersama-sama masyarakat desa. Upaya pengelola BUMDes meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan menurunkan kemiskinan di Desa Paksebali dilakukan dengan melaksanakan unit usaha pengelolaan sampah dengan konsep 3 R yaitu (*Reduce, Reuse dan Recycle*). Pengelola BUMDes mengelola unit usaha sampah dengan sistem TOSS (Tempat Olah Sampah Sementara). Sampah plastik dijadikan briket dan pellet yang berguna sebagai bahan bakar proses memasak dan energi listrik. Sampah organik diolah sebagai bahan pupuk kompos dan didistribusikan ke warga desa (Sumiasih, 2018). Upaya pengelolaan sampah sehingga mengurangi sampah, menggunakan dan mengelola kembali barang bekas memberikan profit bagi BUMDes dan benefit bagi masyarakat desa. Usaha sosial dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pengelola BUMDes ditemukan berperan dalam mengurangi kemiskinan (Sahrakorpi & Bandi, 2021).

Sebagian besar unit usaha BUMDes di Provinsi Bali memberikan pinjaman kepada usaha mikro yang dilakukan masyarakat desa. Bantuan pinjaman tanpa agunan, bunga ringan (0,8 persen) mampu meningkatkan penjualan, sehingga menambah penghasilan keluarga peminjam. Bantuan modal yang diberikan BUMDes mampu meringankan beban keluarga

miskin di pedesaan. Hasil penelitian ini mendukung temuan riset sebelumnya yang menyatakan unit usaha simpan pinjam yang dikelola BUMDes dapat membantu keluarga miskin (Handono Eko Prabowo, 2014). BUMDes di Desa Pekraman di kota Denpasar bekerjasama dengan saling menguntungkan dan menguatkan (Wiagustini, 2015). Usaha simpan pinjam yang dijalankan Bumdes dengan berbasis modal sosial mampu memberdayakan masyarakat di Desa Purwakerti Kabupaten Karangasem (Suastika, 2017), namun demikian temuan ini bertentangan dengan temuan (Wicaksono et al., 2019) yang menyatakan bahwa kecepatan pertumbuhan jumlah BUMDes tidak disertai dengan manfaat yang BUMDes berikan dan BUMDes tidak memberikan peluang kerja di desa. Pelaksanaan pembangunan ekonomi di pedesaan menggunakan dana yang dimiliki pemerintah desa dan tambahan dari keuntungan usaha BUMDes. Usaha BUMDes berkontribusi positif bagi peningkatan Pendapatan Asli Desa (Sinarwati & Prayudi, 2021). Peningkatan Pendapatan Asli Desa yang bersumber dari keuntungan BUMDes disalurkan untuk pemberian bantuan dana Pendidikan. Upaya pengelola BUMDes menurunkan kemiskinan pedesaan dengan indikator peningkatan warga desa korban bencana yang ditangani ditunjukkan oleh BUMDes Artha Dharma Duta Menanga membantu warga desa yang menjadi korban bencana tanah longsor. Desa Menanga mengalami bencana tanah longsor saat musim hujan di tahun 2022, banyak warga desa menjadi korban bencana. Pengelola BUMDes membantu warga membersihkan rumah dari timbunan tanah dan memberikan bantuan pangan kepada warga desa yang menjadi korban bencana.

### **Faktor Pendukung Upaya Pengelola BUMDes Menurunkan Kemiskinan di Pedesaan**

Penurunan kemiskinan penelitian ini diukur dengan menggunakan indikator SDGs Desa yang pertama yaitu Desa Tanpa Kemiskinan. Sembilan indikator tersebut adalah: 1) tingkat kemiskinan di desa mencapai nol persen, 2) peningkatan persentase warga desa peserta sistem jaminan sosial nasional bidang Kesehatan, 3) peningkatan persentase warga desa peserta sistem jaminan sosial nasional bidang ketenagakerjaan, 4) jumlah keluarga miskin penerima bantuan sosial, 5) peningkatan jumlah keluarga miskin mendapat layanan Kesehatan, 6) jumlah keluarga miskin mendapat layanan Pendidikan, 7) jumlah keluarga miskin mendapat layanan air bersih, 8) peningkatan jumlah keluarga miskin mendapat layanan hunian layak, 9) peningkatan jumlah keluarga miskin korban bencana yang ditangani.

Berbagai upaya sudah dilakukan oleh pengelola BUMDes dalam menurunkan kemiskinan pedesaan dengan mengacu Sembilan indikator SDGs Desa Pertama (Desa Tanpa Kemiskinan). Rata-rata upaya penurunan kemiskinan pedesaan, yang diukur dengan sembilan indikator SDGs Desa pertama adalah 33,36 persen. Persentase upaya terbesar menurunkan kemiskinan adalah di indikator peran pengelola BUMDes meningkatkan persentase warga desa peserta sistem jaminan sosial nasional bidang ketenagakerjaan. Peran ini dilakukan dengan cara pengelola BUMDes menjadi agen perisai dan mendaftarkan warga desa menjadi peserta sistem jaminan sosial nasional bidang ketenagakerjaan. Peran pengelola BUMDes menurunkan kemiskinan pedesaan meskipun baru sampai pada angka 33,36 persen didukung oleh *pertama*

ketersediaan sumber daya alam. Sebagian besar desa di Provinsi Bali memiliki sumber daya alam. Yang menjadi modal pendukung usaha BUMDes. BUMDes di Desa Tajun Kabupaten Buleleng, BUMDes di Desa Menanga Kabupaten Karang Asem, BUMDes di Desa Kemenuh Kabupaten Gianyar, mengelola sumber daya alam berupa sumber mata air sehingga menurunkan kemiskinan pedesaan dengan indikator penyediaan air bersih. Peran pengelola BUMDes dengan didukung oleh sumber daya sejalan dengan temuan (Swandari et al., 2017).

Faktor pendukung *kedua* yang mendukung peran pengelola BUMDes menurunkan kemiskinan pedesaan adalah program pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes. Pemberdayaan masyarakat desa dalam menurunkan kemiskinan pedesaan ditemukan ketika masyarakat desa bergotong-royong dengan dikoordinir oleh pengelola BUMDes membuka Kawasan wisata di Desa Kutuh Kabupaten Bandung, membuka akses jalan untuk lokasi wisata di Desa Menanga Kabupaten Karangasem, menata desa wisata di Desa Pakseballi Kabupaten Klungkung, dan bergotong royong membantu warga desa korban bencana lam tanah longsor. Pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes di temukan di BUMDes Desa Bebandem. Pengelola BUMDes memberdayakan kelompok Perempuan pengrajin anyaman sehingga meningkatkan penghasilan anggota kelompok pengrajin. Pemberdayaan perempuan pedesaan yang dilakukan oleh pengelola BUMDes berhasil mendukung program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs Desa. Perempuan yang lebih berdaya secara tidak langsung mengurangi kemiskinan pedesaan. Hasil ini mendukung temuan(Naseer et al., 2021) yang menemukan pemberdayaan meningkatkan kesejahteraan perempuan di Pakistan, dan (Tanzile et al., 2023) yang menyatakan pemberdayaan perempuan mendukung pembangunan berkelanjutan di wilayah timur laut Ghana.

*Ketiga* dukungan pemerintah khususnya Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi kepada BUMDes terbukti berkontribusi pada pengembangan usaha BUMDes. Dua program utama Kementerian Desa untuk BUMDes adalah revitalisasi dan digitalisasi BUMDes. Program revitalisasi dilakukan dengan pendampingan, dukungan permodalan, peningkatan jaringan dan koordinasi. Digitalisasi BUMDes dilakukan dengan pendataan BUMDes pada aplikasi BUMDes berbasis android, penggunaan sosial media untuk penjualan produk BUMDes dan pembuatan aplikasi pasar.id sebagai platform penjualan produk BUMDes (Sinarwati et al., 2020). *Keempat* kerjasama pihak ketiga. Kerjasama BUMDes dengan pihak ketiga diantaranya dilakukan oleh BUMDes Artha Krama Mandiri melakukan kerjasama dengan Universitas Pendidikan Ganesha. BUMDes Dharma Duta Menanga bekerjasama dengan Universitas Mahasaswati, Universitas Pendidikan Ganesha, Bank Rakyat Indonesia. BUMDes Pakseballi melakukan kerjasama dengan Universitas Udayana dan Sekolah Tinggi Kesehatan Bali (STIKES Bali)(Sumiasih, 2018). Dukungan kerjasama dari pihak ketiga dalam mendukung peran pengelola BUMDes menurunkan kemiskinan di pedesaan, mendukung SDGs Desa yang ketujuh belas yaitu kemitraan dalam membangun desa.

*Faktor Penghambat Upaya Pengelola BUMDes Menurunkan Kemiskinan di Pedesaan*

Keberlanjutan BUMDes sangat tergantung pada kemampuan pengelolaan organisasi, karena BUMDes berada dalam situasi yang membutuhkan *ambidextrous management* untuk menjadi organisasi bisnis sosial. Jika aspek sosial yang menjadi titik berat BUMDes, maka perlu disadari bahwa prinsip gotong royong dan kesukarelaan membutuhkan komitmen yang kuat untuk mengikat pihak-pihak yang mengelola BUMDes. Jika BUMDes diarahkan menjadi organisasi bisnis profesional, mengakibatkan pola relasi yang transaksional dan rendahnya rasa memiliki pada modal sosial yang membentuk BUMDes (Gabriella Hanny Kusuma, 2016). Fakta yang ditemukan menjadi penghambat bagi pengelola BUMDes untuk mewujudkan perannya menurunkan kemiskinan pedesaan adalah *pertama* rendahnya kompetensi Sumber Daya Manusia di BUMDes (Yuspan et al., 2019). Seluruh pengelola BUMDes menyatakan bahwa desa mereka memiliki potensi, akan tetapi mereka menyatakan belum mampu mengelola potensi desa dengan optimal (Sinarwati & Prayudi, 2021). Potensi sumber daya alam terdapat di hamper seluruh desa di Bali. Desa Antiga Kelod misalnya memiliki hasil pertanian garam yang melimpah yang belum terjual dengan baik, terdapat hasil tangkapan ikan, pantai dan sumber air/danau yang belum dikelola oleh BUMDes.

*Kedua* kesulitan mencari pegawai karena kemampuan membayar gaji rendah (Ahmad et al., 2018). Mayoritas BUMDes di Provinsi Bali menjalankan satu unit usaha yaitu simpan pinjam dengan tingkat pengembalian pinjaman yang rendah. Kondisi ini tentu menghasilkan keuntungan yang terbatas, sehingga kemampuan BUMDes memberikan gaji kepada pegawai sangat rendah. Hasil wawancara dengan direktur BUMDes di Desa Tiyang Gading Kecamatan Selemadeg menyatakan bahwa beliau sudah berkali-kali menyampaikan keinginan untuk mengundurkan diri sebagai pengelola BUMDes, akan tetapi belum dikabulkan karena belum memperoleh pengganti.

*Ketiga* rendahnya kesadaran masyarakat mengembalikan pinjaman ke BUMDes sehingga menimbulkan kredit macet (Murdiansyah, 2014). Hasil wawancara dengan pengelola BUMDes di Kabupaten Karangasem, Tabanan dan Buleleng menyatakan bahwa rendahnya kesadaran masyarakat desa mengembalikan pinjaman merupakan penyebab utama terjadinya kredit macet. Rendahnya kesadaran mengembalikan disebabkan oleh anggapan dari masyarakat bahwa dana tersebut dari pemerintah yang diberikan sebagai sumbangan sehingga tidak perlu dikembalikan. *Keempat* Kehadiran BUMDes belum banyak diketahui oleh masyarakat desa (Ni Kadek Sinarwati, Made Kembar Sri Budhi, I Made Suyana Utama, 2020). BUMDes merupakan badan hukum yang dimiliki oleh pemerintah desa dan mendapatkan modal dari pemerintah daerah maupun dana dari Kementerian Keuangan melalui dana desa. Khusus untuk BUMDes di Provinsi Bali mendapatkan tambahan pendaan dari Pemerintah Provinsi melalui program gerakan pembangunan desa terpadu (Gerbang Sadu Mandara). BUMDes sebagai badan hukum milik pemerintah desa, dengan modal yang relative masih terbatas, sehingga belum mampu membangun gedung sendiri. Masih banyak ditemukan BUMDes yang meminjam Gedung di kantor desa, sehingga hanya warga desa yang datang ke

kantor desa yang mengetahui keberadaan BUMDes. Kondisi ini menyebabkan partisipasi warga desa terhadap aktivitas usaha BUMDes menjadi terbatas.

## **KESIMPULAN**

BUMDes memainkan beberapa peran diantaranya mendorong tumbuh dan berkembangnya kegiatan ekonomi di desa sehingga memunculkan dampak ekonomi yang lebih luas, memberikan perlindungan kepada masyarakat desa dan menjadi salah satu sumber pendapatan desa sehingga anggaran pembangunan desa meningkat (Widodo, 2016). Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan: persepsi pengelola BUMDes terhadap perannya menurunkan kemiskinan pedesaan, upaya pengelola BUMDes menurunkan kemiskinan pedesaan, factor pendukung pencapaian peran pengelola BUMDes menurunkan kemiskinan dan factor penghambatnya. Terdapat sembilan indikator penurunan kemiskinan mengacu SDGs Desa Pertama yaitu Desa Tanpa Kemiskinan.

Persepsi pengelola BUMDes terhadap perannya menurunkan kemiskinan melalui sembilan indikator tersebut menunjukkan rata-rata pernyataan setuju terhadap perannya menurunkan kemiskinan pedesaan adalah 33,36 persen. Angka ini menunjukkan bahwa pengelola BUMDes berperan dalam menurunkan kemiskinan pedesaan, tetapi dalam kategori yang masih sangat rendah. Peran pengelola BUMDes dalam menurunkan kemiskinan pedesaan adalah pada indikator peningkatan warga desa sebagai peserta sistem jaminan sosial nasional, penyediaan air bersih dan perannya dalam meningkatkan jumlah warga desa miskin korban bencana yang ditangani.

Upaya yang dilakukan pengelola BUMDes menurunkan kemiskinan pedesaan adalah membantu menyalurkan dana bantuan sosial, dana pendidikan dan bantuan Kesehatan dan dana bantuan rumah layak huni. Terdapat empat faktor pendukung pencapaian peran pengelola BUMDes menurunkan kemiskinan pedesaan yaitu ketersediaan sumber daya alam, pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes, dukungan pemerintah dan kerjasama dengan pihak ketiga. Faktor penghambat pencapaian peran pengelola BUMDes menurunkan kemiskinan atau rendahnya peran pengelola BUMDes menurunkan kemiskinan disebabkan oleh empat kondisi yaitu rendahnya kompetensi pengelola dan pegawai BUMDes, kesulitan mencari pegawai karena kemampuan membayar gaji sangat terbatas, kesadaran masyarakat mengembalikan pinjaman sangat rendah dan keberadaan BUMDes belum banyak diketahui oleh masyarakat desa.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis yang sederhana, hanya bersifat deskriptif. Penelitian berikutnya diharapkan memperdalam tingkat eksplanasi. Temuan penelitian menyatakan bahwa peran pengelola BUMDes masih rendah. Faktor penghambat utama peran pengelola BUMDes menurunkan kemiskinan pedesaan adalah rendahnya kompetensi pengelola dan pegawai BUMDes. Temuan ini berimplikasi pada pentingnya meningkatkan pelatihan dan pendampingan kepada pengelola dan pegawai BUMDes. Pihak terkait yang memiliki kewajiban meningkatkan pelatihan dan pendampingan diantaranya tenaga ahli

pemberdayaan masyarakat desa baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten. Perguruan tinggi wajib berpartisipasi aktif dalam meningkatkan kompetensi pegawai dan pengelola BUMDes melalui program pengabdian kepada masyarakat dan mengimplimentasikan program MBKM (Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka). Peningkatan kompetensi pegawai dan pengelola BUMDes juga hendaknya datang dari dalam diri pengelola dan pegawai dengan cara meningkatkan jenjang Pendidikan dengan mengikuti program RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau) dan meningkatkan orientasi kewirausahaan secara mandiri.

### **UCAPAN TERIMAKASIH**

Peneliti mengucapkan terimakasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Pendidikan Ganesha atas pendanaan penelitian yang diberikan. Penelitian ini didanai dengan kontrak nomer 741/UN.48.16/LT/2023. Peneliti juga mengucapkan terimakasih kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali atas data BUMDes yang diberikan, serta terimakasih kepada seluruh responden dan tim penelitian.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Aggarwal, S. (2018). Do rural roads create pathways out of poverty? Evidence from India. *Journal of Development Economics*, 133, 375–395. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2018.01.004>
- Ahmad, O., Ihsan, N., Profesor, J., Soedarto, H., Hukum, S., & Semarang, T. (2018). Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gerbang Lentera Sebagai Penggerak Desa Wisata Lerep. *Journal of Politic and Government Studies*, 7(04), 221–230. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/21911>
- Anggraeni, M. R. R. S. (2016). PERANAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) PADA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PEDESAAN STUDI PADA BUMDES GUNUNG KIDUL YOGYAKARTA. *MODUS*, 28(2), 1–14.
- Badan, T. (1945). *I. 5 2. 0865*.
- Banerjee, S. (2017). Microfinance and the business of poverty reduction: Critical perspectives from rural Bangladesh. *Human Relations*, 70(1), 63–91. <https://doi.org/10.1177/0018726716640865>
- BPS. (2022). *Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia Tahun 2021*.
- Eggerman, J. J., Dajani, R., Kumar, P., Chui, S., Qtaishat, L., El Kharouf, A., & Panter-Brick, C. (2023). Social networks, empowerment, and wellbeing among Syrian refugee and Jordanian women: Implications for development and social inclusion. *World Development*, 170, 106324. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2023.106324>
- Gabriella Hanny Kusuma, N. P. S. (2016). *BUMDes: Kewirausahaan Sosial yang Berkelanjutan*.
- GU, R., & NIE, F. ying. (2021). Does empowering women benefit poverty reduction? Evidence

- from a multi-component program in the Inner Mongolia Autonomous Region of China. *Journal of Integrative Agriculture*, 20(4), 1092–1106. [https://doi.org/10.1016/S2095-3119\(20\)63436-0](https://doi.org/10.1016/S2095-3119(20)63436-0)
- Handono Eko Prabowo, T. (2014). Developing bumdes (village-owned enterprise) for sustainable poverty alleviation model village community study in Bleberan-Gunung Kidul-Indonesia. *World Applied Sciences Journal*, 30(30 A), 19–26. <https://doi.org/10.5829/idosi.wasj.2014.30.icmrp.4>
- Haryanti, D. M., Rahayu, S., Hati, H., Wirastuti, A., & Susanto, K. (2016). *Wirausaha S Sial? May. Indikator SDG's dan Kewenanannya*. (n.d.).
- Liu, Y. (2016). A geographic identification of multidimensional poverty in rural China under the framework of sustainable livelihoods analysis. *Applied Geography*, 73, 62–76. <https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2016.06.004>
- Liu, Y. (2019). Rural land engineering and poverty alleviation: Lessons from typical regions in China. *Journal of Geographical Sciences*, 29(5), 643–657. <https://doi.org/10.1007/s11442-019-1619-9>
- Lo, K. (2016). Spatial restructuring through poverty alleviation resettlement in rural China. *Journal of Rural Studies*, 47, 496–505. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2016.06.006>
- Muhtar. (2020). Peran Pendamping Program Keluarga Harapan Dalam Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Magetan. *Sosio Konsepsia*, 10(1), 45–54.
- Murdiansyah, I. (2014). Evaluasi Program Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus pada Program Gerdu-Taskin di Kabupaten Malang). *Jurnal Widya Gama Lumajang*, 4(1), 71–92.
- Naseer, Z., Hu, H., Yaseen, M., & Tariq, M. (2021). Rural women empowerment through social protection programs: A case of Benazir income support programme in Punjab, Pakistan. *Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences*, 20(2), 67–74. <https://doi.org/10.1016/j.jssas.2020.11.005>
- Ni Kadek Sinarwati, Made Kembar Sri Budhi, I Made Suyana Utama, A. M. (2020). *Peran Sumber Daya BUMDes, Modal Sosial, dan Kewirausahaan Terhadap Kinerja dan Kesejahteraan Pengrajin di Kabupaten Karangasem*.
- Ni Kadek Sinarwati, A. M. (2019). The Role of Village Own Enterprises to Rural Development. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law. The Role of Village Own Enterprises to Rural Development. South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, 18(5), 77–83. [https://seajbel.com/wp-content/uploads/2019/04/seajbel5-VOL18\\_227.pdf](https://seajbel.com/wp-content/uploads/2019/04/seajbel5-VOL18_227.pdf)
- Pada, S., Di, B., & Kidul, G. (2016). *KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PEDESAAN*. 28(2), 155–167.
- Poverty and its measurement*. (n.d.).
- Sahrakorpi, T., & Bandi, V. (2021). Empowerment or employment? Uncovering the paradoxes

- of social entrepreneurship for women via Husk Power Systems in rural North India. *Energy Research and Social Science*, 79(March), 102153. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2021.102153>
- Sayuti, H. M. (2011). PELEMBAGAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDs) SEBAGAI PENGGERAK POTENSI EKONOMI DESA DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN DI KABUPATEN DONGGAL. *Jurnal ACADEMICA Fisip Untad*, 03(02), 717–728.
- Sinarwati, N. K., & Prayudi, M. A. (2021). Kinerja Badan Usaha Milik Desa Dan Kontribusinya Bagi Pendapatan Asli Desa. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 10(3), 505. <https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v10i3.37931>
- Sinarwati, N. K., Yasa, I. N. P., & Putra, I. M. P. A. (2020). Does Indonesian Government Program Have an Impact on the Development of Village-Owned Enterprise? 158(Teams), 31–36. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.201212.005>
- Steiner, 2015 contribution of rural enterprise to local resilience. (n.d.).
- Suastika, I. N. (2017). Village Enterprises (A Case Study of Rural Enterprise-Based Social Capital at The Purwakerti Village Community). *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, 12(4), 26–29.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sumiasih, K. (2018). Peran BUMDes Dalam Pengelolaan Sektor Pariwisata (Studi di Desa Pakse Bali, Kabupaten Klungkung). *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 7(4), 565. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2018.v07.i04.p10>
- Swandari, N. K. A. S., Setiawina, N. D., & Marhaeni, A. A. I. N. (2017). Analisis Faktor-Faktor Penentu Kinerja Karyawan BUMDes di Kabupaten Jembrana. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4(VOLUME.06.NO.04.TAHUN 2017), 1365–1394.
- Tanzile, R., Domapielle, M. K., & Fielmua, N. (2023). Empowering women for sustainable development through semi-mechanized sheabutter processing in rural North-Western Ghana. *Scientific African*, 21, e01790. <https://doi.org/10.1016/j.sciaf.2023.e01790>
- Wiagustini, N. L. P. (2015). Partnership Strategy of Village Owned Enterprises (Village Credit Institutions and Village Markets ) in Denpasar City , Indonesia. *International Journal of Economics, Commerce and Management*, III(4), 1–20.
- Wicaksono, E., Arifin, B., Tenrini, R. H., Wardhana, W., Setiawan, H., Damayanty, S. A., Solikin, A., Suhendra, M., & Saputra, A. H. (2019). Village Fund , Village-Owned Enterprises and Employment Evidence from Indonesia. *Journal of Rural Studies*, 79(February), 382–394. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2020.08.052>
- Widodo, I. S. (2016). Badan Usaha Milik Desa Sebagai Salah Satu Alternatif Sumber Pendapatan Desa Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Panorama Hukum*, 1(1), 1–14. <http://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jph/article/view/1161>
- Winarti, S. E., & Herawati. (2020). the Empowerment of Women Groups Using the Village-

- Owned Enterprise in Creasing Village Community Income. *Sosio Konsepsia*, 9(2), 171–184.
- Yeganeh, M., Rezvani, M. H., & Laribaghal, S. M. (2021). Jo ur n Pr pr oo. *Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects*, 127120. <https://doi.org/10.1016/j.joitmc.2023.100159>
- Yuspan, B., Rusniati, & Mailensun, T. P. (2019). Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Bumdes Di Desa Rumbia Kecamatan Botumoito Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Politico*, 1, 1–6. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico /article/view/30492>
- Zulkarnain, R. (2013). Payung Hukum Pembentukan BUMDes. *Fiat Jusititia Jurnal Ilmu Hukum*, 7(3), 333–356.